

SKRIPSI

**PENERTIBAN TAMBANG BATUAN ILEGAL DI KABUPATEN
REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ARI SAPUTRA

1310111037

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



PEMBIMBING

Syofiarti, S.H.,M.Hum

Darnis, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

PENERTIBAN TAMBANG BATUAN ILEGAL DI KABUPATEN

REJANG LEBONG

(Ari Saputra, 1310111037, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2017, 78

halaman)

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA) yang tidak terlepas dari pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan dibidang-bidang lain sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan lebih baik untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional. Pertambangan merupakan industri tertua kedua setelah pertanian. Pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan atau yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan ilegal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana penertiban pertambangan batuan ilegal dikabupaten rejang lebong. 2) Tindakan apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam menertibkan pertambangan pasir yang tidak memiliki izin operasi dan berada di kawasan bukan peruntukan usaha pertambangan. 3) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan upaya penertiban pertambangan pasir yang tidak memiliki izin.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris yang memiliki tujuan sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui bagaimana penertiban terhadap Pertambangan Batuan ilegal di Kabupaten Rejang Lebong. 2) Untuk mengetahui tindakan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam menertibkan tambang batuan yang tidak memiliki izin operasi. 3) Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan penertiban tambang batuan yang tidak/belum memiliki izin.

Kata kunci : Penertiban Tambang Batuan